

## DAFTAR ISI

Daftar isi .....	1
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Asri Cikupa Karya .....	2
Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Asri Cikupa Karya .....	
A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	3
B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris .....	4
C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite .....	5
D. Kepemilikan Saham Anggota Komisaris .....	5
E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris, Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR .....	5
F. Paket/Kebijakan Remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris .....	6
H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris .....	7
I. Jumlah Penyimpangan Intern .....	7
J. Jumlah Permasalahan Hukum dan upaya penyelesaian oleh BPR .....	7
K. Transaksi yang mengandung Benturan kepentingan .....	7
L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan Politik, baik Nominal maupun penerima dana .....	7
M. Hasil Penilaian ( Self Assesment ) dan kesimpulan umum .....	8

# **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA**

## **PT BPR ASRI CIKUPA KARYA**

### **TAHUN 2017**

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR Asri Cikupa Karya berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola, namun masih dibutuhkan waktu dan pentahapan di dalam penyiapan struktur dan infrastrukturnya.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR Asri Cikupa Karya disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2017:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- C. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
- D. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- F. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- G. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- H. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- I. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- J. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris
- K. Jumlah Penyimpangan Intern
- L. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- M. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- N. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik, Baik Nominal maupun Penerima Dana
- O. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum.

## A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Perseroan diurus dan dipimpin oleh 2(dua) orang Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tahun 2017 tidak ada perubahan susunan Direksi, sehingga susunan Direksi selengkapnya adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Diana Rofaidah	Direktur Utama	5 Tahun
2	Irdawati	Direktur	5 Tahun

- Seluruh Anggota Direksi telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Direktur BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.

### **Tugas dan Tanggung Jawab Direksi**

Direksi telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.
- b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- d. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
  - 1) Fungsi audit intern;
  - 2) Fungsi manajemen risiko; dan
  - 3) Fungsi kepatuhan
- e. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- f. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - 1) pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - 2) penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- g. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
- i. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

### **Tindak Lanjut Terhadap Rekomendasi Dewan Komisaris**

Direksi telah berupaya melaksanakan rekomendasi Dewan Komisaris sbb:

1. Persetujuan kenaikan Gaji Karyawan 2017
2. Persetujuan RBB tahun 2017
3. Persetujuan Perubahan Ketentuan yang mengatur tentang hak-hak dan fasilitas Komisaris dan Direksi

### **B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 2(dua) orang Anggota Dewan Komisaris, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Pada tahun 2017 tidak ada perubahan Anggota Dewan Komisaris, sehingga susunan Anggota Dewan Komisaris selengkapnya adalah sebagai berikut :

dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Masa Jabatan
1	Ang Kie Kwan	Komisaris Utama	5 Tahun
2	Mohamad Djufri	Komisaris	10 Tahun

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris telah memiliki sertifikat kompetensi sebagai Komisaris BPR yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) LKM Certif dan masih berlaku.
- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan pada Bank lain.

#### **❖ Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris telah melaksanakan Tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar BPR, antara lain :

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- d. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - 1) penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - 2) hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.

- f. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
- 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

**Rekomendasi Dewan Komisaris kepada Direksi**

Melalui rapat-rapat Dewan Komisaris, pada tahun 2017 Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Direksi sbb:

1. Pengajuan calon Direksi
2. Penurunan NPL
3. Penanganan Kredit Macet
4. Rencana Bisnis

**C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

- Seluruh Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham.

**D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

Nama Anggota Dewan Komisaris	Kepemilikan Saham		
	PT BPR Asri Cikupa Karya	BPR Lain	Perusahaan Lain
Ang Kie Kwan	27%	Nihil	Nihil
ERLINDA ROSY	Nihil	Nihil	Nihil

**E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

- Seluruh Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan Pemegang Saham.

**F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS**

Berikut adalah informasi mengenai jumlah remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017.

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun	
	Dewan Komisaris	Direksi
Jumlah keseluruhan gaji	Rp. 72.000.000,-	Rp. 180.000000,-
Tunjangan	Rp. 15.900.000,-	Rp. 24.000.000,-
Tantiem	Rp. 7.200.000,-	Rp. 18.000.000,-
Kompensasi berbasis saham	Rp. 0,-	Rp. 0,-
Remunerasi berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab dan risiko <sup>*)</sup>	-	-

*) sudah termasuk dalam jumlah keseluruhan gaji		
Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	-	-

#### G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya

Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah:

- a) rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah adalah 9 % dan 3 %
- b) rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah 69% dan 31%
- c) rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah 50% dan 50%

#### H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

Rapat-rapat Dewan Komisaris pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

No	Topik Rapat	Tanggal	Peserta Rapat
1	Pencapaian Rencana Bisnis	27 /01/ 2017	4
2	Target Pencapaian Asset Bank sampai dengan bulan Maret 2017	14 /04/ 2017	4
3	Penurunan NPL sampai dengan bulan Juni 2017	14/07/2017	4
4			
	<b>Jumlah rapat</b>		

Data Kehadiran Anggota Dewan Komisaris pada Rapat Dewan Komisaris:

Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
Ang Kie Kwan	4	33
Mohamad Djufri	4	33
Total rapat per tahun	12	100

**I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Internal Fraud dalam 1 tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2016 dan 2017 tidak ada penyimpangan intern.

**J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

Pada tahun 2017 tidak terdapat permasalahan hukum.

**K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Tabel berikut ini menunjukkan pemberian kredit kepada pihak terkait:

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

Pada tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan.

**L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK, BAIK NOMINAL MAUPUN PENERIMA DANA**

Pemberian dana kepada pihak-pihak tersentu dilakukan PT. BPR Asri Cikupa Karya selama tahun 2017 adalah untuk kepentingan sosial kepada anak yatim dan sumbangan keamanan serta retribusi desa serta sumbangan sosial lainnya penerima dengan total sebesar Rp. 58 Juta,-

#### M. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

Memenuhi ketentuan pasal 77 POJK nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, PT. BPR Asri Cikupa Karya melakukan *self assessment* pertama kalinya untuk periode yang berakhir pada 31 Des 2017. Kertas kerja dan kesimpulan *self assessment* dilampirkan dalam laporan ini.

Berikut adalah ringkasan hasil perhitungan nilai komposit *self assessment* untuk periode 2017:

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	2,00	0.40
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	2,00	0.25
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) belum melaksanakan	0%	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	2,00	0.20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	2,00	0.20
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2,00	0.20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	2,00	0.05
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern <sup>*)</sup>	10%	1,48	0,15
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	2,00	0,15
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	2,00	0,15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	2,00	0,15
	Nilai Komposit	90%		1,90
	Peringkat Komposit		Baik	

<sup>\*)</sup> diperhitungkan sesuai pentahapan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai manajemen risiko BPR. Dengan demikian, total penyebut sebelum pentahapan penerapan manajemen risiko adalah 90.

Secara umum hasil *self assessment* menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Baik, namun masih terdapat kelemahan pada faktor 5 dan faktor 6, dan pada tahun 2018 akan diupayakan perbaikan nilai pada kedua faktor tersebut, antara lain melalui pemenuhan struktur organisasi dan pelaksanaannya.

Jakarta, 30 April 2018  
Direksi dan Dewan Komisaris  
PT. BPR ASRI CIKUPA KARYA

Diana Rofaidah  
Direktur Utama

Ang Kie Kwan  
Komisaris Utama